



## **Kilas Balik Peran Dakwah Anggota Legislatif Perempuan di DKI Jakarta**

**Siti Maryamah Kadriyah**

Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: smaryamah255@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengangkat isu penting berkenaan dengan peran perempuan Muslim dalam politik sebagai bagian dari dakwah kontemporer. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana anggota perempuan Muslimah DPRD DKI Jakarta dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dakwah mereka melalui pendekatan struktural seperti penguatan institusi keagamaan, pemberdayaan ekonomi, advokasi kebijakan syariah, dan pendekatan keluarga. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa anggota dewan memadukan dakwah dengan tugas legislasi, menghasilkan dampak positif pada kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penguatan nilai-nilai keluarga berbasis Islam.

**Kata kunci:** *Dakwah politik, Politik gender, Pemilu 2024*

### **ABSTRACT**

*This research stems from the importance of Muslim women's roles in politics as part of contemporary da'wah. The problem addressed is how Muslim female members of the DKI Jakarta Regional Legislative Council integrate Islamic values into public policy. This study aims to analyze their da'wah roles through structural approaches, such as strengthening religious institutions, empowering the economy, advocating for sharia-based policies, and enhancing family development. Using a descriptive qualitative method based on interviews and document analysis, the findings reveal that council members integrate da'wah with legislative tasks, resulting in positive impacts on policies promoting women's empowerment and strengthening family values based on Islamic principles..*

**Keywords:** *Islamic Da'wa, Gender Politics, Election 2024*

## A. Pendahuluan

Sejak reformasi 1998, peran perempuan dalam politik Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kebijakan afirmasi berupa kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif menjadi tonggak penting dalam membuka jalan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Namun, realisasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk budaya patriarki, kurangnya dukungan partai, dan keterbatasan sumber daya perempuan dalam politik. Dalam konteks ini, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menawarkan dinamika politik yang unik. Sebagai pusat kekuasaan dan representasi keberagaman Indonesia, DKI Jakarta menyediakan ruang strategis bagi perempuan untuk berkontribusi di kancah politik, termasuk dalam ranah dakwah.

Dakwah, dalam konteks ini, tidak semata-mata dipahami sebagai penyampaian nilai-nilai keagamaan melalui medium tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya transformasi sosial. Legislator perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan melalui kebijakan yang inklusif, pemberdayaan komunitas, dan promosi nilai-nilai Islam yang moderat dan progresif. Pemilu 2019 menjadi salah satu tonggak yang menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di DKI Jakarta, di mana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meningkat meskipun masih jauh dari ideal.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, meskipun belum mencapai angka ideal 30% sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan afirmasi gender. Untuk DKI Jakarta, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa dari 106 kursi DPRD DKI Jakarta, hanya 24 kursi yang berhasil diisi oleh perempuan, atau sekitar 22,6% dari total anggota DPRD. Angka ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang hanya mencatat keterwakilan perempuan sebesar 18,6%. Hal ini mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun, angka ini masih jauh dari harapan, mengingat kompleksitas isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan seperti Jakarta.<sup>1</sup>

Secara nasional, keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 mencapai 20,52%, naik dari 17,32% pada Pemilu 2014. Peningkatan ini menandakan bahwa masyarakat mulai mengapresiasi pentingnya keberagaman gender dalam pengambilan

---

<sup>1</sup> Muhammad Andhika Febri Mulyawan, "Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46581>.

keputusan politik. Namun, tantangan utama masih terletak pada bagaimana perempuan mampu menjalankan peran mereka secara substansial di tengah dominasi struktur politik yang patriarkal.<sup>2</sup>

Peran perempuan dalam politik sering kali menghadapi ekspektasi ganda. Di satu sisi, mereka dituntut untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, mereka diharapkan mampu membawa nilai-nilai keagamaan ke dalam politik secara moderat dan relevan. Di DKI Jakarta, perempuan legislator pada periode 2019-2024 menunjukkan berbagai model dakwah yang menarik untuk dikaji.

Beberapa legislator memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas melalui kegiatan sosial seperti penguatan ekonomi keluarga, pendidikan agama informal, dan kampanye nilai-nilai keberagaman. Pendekatan ini relevan dalam konteks perkotaan seperti Jakarta, di mana masyarakatnya sangat heterogen baik dari segi etnis, agama, maupun status sosial ekonomi. Sementara itu, ada pula perempuan legislator yang mengintegrasikan dakwah dalam kerja-kerja legislasi melalui pengusulan perda-perda berbasis nilai-nilai Islam, seperti perlindungan anak, pemberantasan narkoba, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Model dakwah ini tidak hanya menjadi instrumen politik, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan antara legislator dan konstituen mereka. Dalam masyarakat yang semakin kritis terhadap pemerintah, pendekatan ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap legislator perempuan sebagai figur yang tidak hanya kompeten secara politik tetapi juga memiliki integritas moral.

Hasil Pemilu 2019 di DKI Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat mulai memberikan kepercayaan lebih besar kepada perempuan untuk mewakili aspirasi mereka. Meskipun belum mencapai kuota 30%, peningkatan jumlah legislator perempuan di DPRD DKI Jakarta menunjukkan adanya pergeseran paradigma tentang peran perempuan dalam politik.<sup>3</sup>

Peningkatan ini tidak terlepas dari strategi kampanye yang semakin personal dan berbasis isu, di mana calon legislator perempuan mampu menarik simpati masyarakat

---

<sup>2</sup> Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 01 (2016): 25-34.

<sup>3</sup> Artanti Paramesti dan Revo Linggar Vandito, "IMPLEMENTASI KUOTA GENDER DALAM MEMPENGARUHI EKSISTENSI PEREMPUAN: STUDI KASUS REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPRD DKI JAKARTA PERIODE 2019-2024," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 02 (2024): 17-33.

melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dakwah dalam kampanye politik ini sering kali diwujudkan melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga, pengajian komunitas, atau diskusi tentang nilai-nilai keluarga Islami.

Namun, di sisi lain, perempuan legislator juga menghadapi tantangan besar dalam menjalankan dakwah politik mereka. Tantangan ini mencakup stigma yang masih melekat pada perempuan dalam politik, minimnya dukungan struktural dari partai, serta ekspektasi masyarakat yang kadang berlawanan. Sebagai contoh, perempuan legislator diharapkan bisa vokal dalam isu-isu publik, tetapi juga diharapkan untuk tetap "sesuai kodrat" sebagai perempuan.<sup>4</sup>

Selanjutnya pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas dakwah politik perempuan legislator selama periode 2019-2024. Dalam lima tahun terakhir, berbagai isu sosial dan politik seperti pandemi COVID-19, transformasi digital, dan meningkatnya polarisasi politik telah memengaruhi cara legislator perempuan menjalankan dakwah politik mereka.

Perempuan legislator yang sebelumnya aktif melalui kegiatan tatap muka, kini harus beradaptasi dengan platform digital untuk menjangkau konstituen mereka. Media sosial menjadi ruang baru untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, baik dalam bentuk konten edukatif, diskusi daring, maupun kampanye program. Namun, digitalisasi ini juga membawa tantangan baru berupa disinformasi, serangan siber, dan polarisasi opini publik yang dapat menghambat upaya dakwah politik.

Selain itu, isu-isu gender dan inklusi sosial juga menjadi semakin relevan dalam konteks Pemilu 2024. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin menuntut keterwakilan perempuan yang tidak hanya simbolis tetapi juga substansial. Dakwah politik yang dilakukan oleh perempuan legislator harus mampu menjawab tuntutan ini dengan menawarkan solusi yang konkret dan relevan, baik melalui kebijakan maupun program pemberdayaan masyarakat.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta memainkan peran strategis dalam peta politik nasional. Keberagaman masyarakatnya menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi perempuan legislator untuk menjalankan dakwah politik yang inklusif dan adaptif. Jakarta menjadi miniatur Indonesia, di mana isu-isu lokal sering kali

---

<sup>4</sup> Ariyanto Ardiansya dkk., "Gender Equality in Political Life in Indonesia," *International Journal of Health Sciences*, 2 Juli 2022, 678-91, <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS6.10182>.

mencerminkan isu-isu nasional, seperti ketimpangan sosial, pluralisme, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks ini, dakwah politik perempuan legislator di Jakarta tidak hanya berdampak pada konstituen lokal tetapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain. Legislator perempuan Jakarta sering kali menjadi role model bagi perempuan-perempuan lain yang ingin terlibat dalam politik. Dakwah yang mereka lakukan melalui legislasi, advokasi, dan komunikasi publik menjadi contoh bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diintegrasikan dengan agenda politik yang progresif.<sup>5</sup>

Penelitian tentang model dakwah perempuan legislator di DKI Jakarta menjadi semakin penting di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Pemilu 2024 menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana perempuan legislator telah berhasil membawa perubahan melalui dakwah politik mereka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perempuan yang ingin berkontribusi lebih besar di ranah politik dan dakwah.

Dengan mengkaji kilas balik pada hasil Pemilu 2019, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana perempuan legislator dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi partai politik, lembaga pendidikan politik, dan organisasi masyarakat dalam mendukung perempuan untuk memainkan peran strategis mereka di masa depan.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali secara mendalam model dakwah yang diterapkan oleh perempuan legislator di DKI Jakarta pada periode 2019-2024. Data utama diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima perempuan anggota legislatif DPRD DKI Jakarta yang terpilih pada Pemilu 2019. Responden dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam program-program yang mengintegrasikan dakwah dengan tugas legislasi. Wawancara bertujuan untuk memahami pandangan, strategi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan dakwah politik.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan metode data sekunder berupa analisis dokumen, seperti laporan kinerja DPRD, kebijakan yang diinisiasi oleh perempuan

---

<sup>5</sup> Iqbal Syafrudin, "Peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender (study perilaku politik 2 anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia)," *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 176-81.

legislator, serta data pemilu yang relevan. Studi literatur dari jurnal, buku, dan artikel tentang dakwah politik perempuan dan keterwakilan perempuan di Indonesia juga digunakan untuk memperkaya analisis. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dakwah yang muncul dan relevansi strategi tersebut terhadap dinamika politik pasca-Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 responden anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta, dapat diidentifikasi beberapa temuan terkait peran dakwah mereka dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat:

#### 1. Dakwah Melalui Penguatan Institusi Keagamaan

Peran dakwah yang dilakukan oleh anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta menunjukkan transformasi paradigma dakwah dari model konvensional menuju dakwah struktural. Menurut teori dakwah yang dikemukakan oleh Abdul Munir Mulkan, dakwah struktural merupakan model dakwah yang memanfaatkan struktur sosial, politik, dan birokrasi untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari upaya strategis yang dilakukan oleh Hj. Nurjanah Hulwani yang berhasil memasukkan Majelis Ta'lim ke dalam Perda Pendidikan:

"Kontribusi perjuangan pertama; di Perda pendidikan, memasukan Majelis Ta'lim (MT) sebagai pendidikan non formal karena di MT itu pusat pendidikan agama bagi orang awan dan ada pemberdayaan. Dan Majelis Ta'lim di Jakarta ada 10.000 dengan tidak berpayungkan Hukum."<sup>6</sup>

Keberhasilan ini menunjukkan implementasi dari teori institusionalisasi dakwah yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas tentang pentingnya transformasi ruang publik (*public sphere*) menjadi wadah legitimasi bagi ekspresi keagamaan dalam konteks negara modern. Hal ini sekaligus menguatkan kaidah bahwa "obyek atau sasaran dakwah (*mad'u*) pada dasarnya selalu tersegmentasi."<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam konteks gender, penguatan institusi keagamaan seperti Majelis Ta'lim memiliki signifikansi khusus. Menurut teori feminisme Islam yang dikembangkan oleh Fatima Mernissi, perempuan Muslim perlu memiliki ruang publik

---

<sup>6</sup> Nurjanah Hulwani, An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period, 3 April 2019.

<sup>7</sup> Muhamad, "Refleksi Penafsiran Ayat-ayat Dakwah Thomas McElwain," *Ad-DA'WAH* 21, no. 1 (20 Februari 2023): 12-25, <https://doi.org/10.59109/addawah.v21i1.37>.

yang legitimate untuk mengekspresikan agensi keagamaan mereka. Majelis Ta'lim, sebagai institusi pendidikan non-formal, telah menjadi ruang strategis bagi pemberdayaan perempuan Muslim perkotaan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Pieterella van Doorn-Harder yang menunjukkan bahwa institusi keagamaan berbasis perempuan di Indonesia telah berperan penting dalam membentuk interpretasi Islam yang lebih responsif gender. Upaya legislator perempuan Muslim di DPRD DKI Jakarta dalam melegalkan status Majelis Ta'lim melalui Perda dapat dilihat sebagai bentuk "feminist jurisprudence" dalam konteks politik lokal.

Dari perspektif politik, penguatan institusi keagamaan melalui jalur legislasi mencerminkan apa yang disebut oleh José Casanova sebagai "public religions in the modern world" - dimana agama tidak lagi terpinggirkan dalam ruang privat tetapi berperan aktif dalam ruang publik modern. Hal ini terlihat dari strategi politik yang digunakan para legislator perempuan Muslim, seperti yang diungkapkan Hj. Nurjanah Hulwani:

"Yang terpenting itu loby tapi berbeda loby kita dengan loby orang di luar. Loby disini untuk kepentingan aspirasi masyarakat banyak, itu sudah kerjanya. Kita koordinasikan dengan dinas-dinas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lain-lain."<sup>8</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan teori politik Islam yang dikembangkan oleh Asef Bayat tentang "post-Islamism" - dimana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi modern melalui jalur-jalur institusional yang sah. Meskipun demikian, upaya penguatan institusi keagamaan melalui jalur legislatif menghadapi beberapa tantangan, seperti yang diungkapkan oleh Hj. Rany Mauliani:

"Tapi tidak dapat dukungan, karena pada waktu itu perempuan di 2009 cuma ada 22 orang dan yang di Badan Legislasi tidak sampai 10 orang sedang laki-laki ada 72 orang. Jangankan voting, kita sudah pasti kalah."<sup>9</sup>

Tantangan ini mencerminkan apa yang disebut oleh Deniz Kandiyoti sebagai "patriarchal bargaining" - dimana perempuan harus bernegosiasi dalam sistem patriarki untuk mencapai tujuan pemberdayaan mereka.

---

<sup>8</sup> Hulwani, An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period.

<sup>9</sup> Rany Mauliani, An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period, 3 April 2019.

## 2. Dakwah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dakwah tidak hanya terbatas pada aspek ritual atau ibadah formal, tetapi juga mencakup upaya memberdayakan umat melalui berbagai pendekatan, salah satunya pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, perempuan Muslimah anggota DPRD DKI Jakarta memainkan peran penting dengan menjadikan pemberdayaan ekonomi umat sebagai bentuk dakwah yang konkret. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga memperkuat kemandirian, terutama di kalangan perempuan. Hj. Nurjanah Hulwani, salah seorang responden, mengungkapkan bagaimana ia mengupayakan pemberdayaan perempuan melalui kebijakan ekonomi mikro. Ia menyebutkan:

"Ketika saya ada di komisi A, saya mencoba memperjuangkan pemberdayaan perempuan melalui di kelurahan harus ada dana PPMK namanya. Agar kebanyakan dari ibu-ibu yang jualan nasi uduk, makanan dan lain-lain dapat terbantuan dananya."<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana peran politik seorang perempuan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai dakwah melalui tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam perspektif Islam, dakwah memiliki cakupan luas yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. QS. Al-Ma'un (107:1-3) menyebutkan pentingnya memberi perhatian kepada kaum lemah, seperti fakir miskin, yang menjadi salah satu fokus pemberdayaan ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, upaya seperti yang dilakukan oleh Hj. Nurjanah Hulwani dapat dianggap sebagai implementasi ajaran ini dalam konteks modern.

Menurut teori dakwah seperti diungkapkan Quraish Shihab, dakwah tidak hanya berupa ajakan verbal tetapi juga tindakan yang memberikan solusi nyata terhadap persoalan umat. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, dakwah yang dilakukan oleh perempuan Muslimah DPRD mencerminkan pendekatan tersebut. Melalui program-program seperti PPMK, anggota dewan tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga memfasilitasi umat untuk menjadi lebih mandiri.

Kemudian jika dilihat dari perspektif gender, perempuan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah White tentang pemberdayaan perempuan menyoroti bahwa akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi berpengaruh signifikan pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam kasus ini, program-program pemberdayaan yang

---

<sup>10</sup> Hulwani, An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period.

diperjuangkan oleh anggota dewan perempuan bertujuan membuka akses ekonomi bagi perempuan, terutama di sektor usaha mikro.

Program PPMK (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera), sebagaimana disebutkan oleh Hj. Nurjanah, adalah contoh konkret bagaimana pendekatan berbasis gender dapat diterapkan. Program ini memungkinkan perempuan, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses kepada modal usaha. Dalam dakwah, tindakan ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup ekonomi tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai Islam, seperti kemandirian, kerja keras, dan solidaritas sosial.

Peran politik yang dimainkan oleh perempuan Muslimah DPRD menunjukkan bahwa dakwah dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan publik. Menurut teori politik Islam, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Asad dalam *The Principles of State and Government in Islam*, kebijakan publik yang berbasis nilai-nilai Islam adalah bentuk dakwah yang strategis dan terstruktur. Dengan menggunakan posisinya di lembaga legislatif, para anggota dewan dapat memperjuangkan alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung program pemberdayaan umat.<sup>11</sup>

Sebagai contoh, advokasi yang dilakukan oleh Hj. Nurjanah terhadap program PPMK menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan publik dapat diarahkan untuk memberdayakan umat. Program ini menyediakan dana yang dikhususkan untuk membantu usaha kecil yang mayoritas dijalankan oleh perempuan. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan spiritual masyarakat.

Pendekatan dakwah melalui pemberdayaan ekonomi mencerminkan sinergi antara tiga dimensi: dakwah, ekonomi, dan politik. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, dakwah yang efektif adalah yang mampu menjawab kebutuhan umat secara langsung. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat yang diperjuangkan melalui kebijakan politik adalah salah satu wujud nyata dari dakwah yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Sebagai bentuk implementasi, program-program ekonomi mikro seperti PPMK memiliki dampak luas. Selain memberikan modal usaha, program ini juga menjadi sarana membangun kesadaran spiritual dan solidaritas sosial. Hj. Nurjanah, misalnya,

---

<sup>11</sup> Muhammad Asad, *The principles of state and government in Islam* (Univ of California Press, 2023), <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=asPLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+Principles+of+State+and+Government+in+Islam&ots=PyY-879J3f&sig=7ntkVgheCi1EDc-YHMNHTUFICxY>.

menyebut bahwa program ini tidak hanya membantu perempuan memulai usaha tetapi juga mengajarkan mereka untuk berbagi dan saling mendukung dalam komunitas.

Meskipun memiliki potensi besar, dakwah melalui pemberdayaan ekonomi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi birokrasi dan keterbatasan anggaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Responden 04:

"Kadang sulit memperjuangkan program ini di tengah banyaknya kepentingan politik yang saling bertabrakan, tetapi kita harus tetap konsisten dan mencari jalan terbaik."<sup>12</sup>

Namun, tantangan ini tidak menyurutkan semangat para anggota dewan dalam melaksanakan dakwah melalui pemberdayaan ekonomi. Justru, tantangan ini menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa dakwah adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan strategi.

Dakwah melalui pemberdayaan ekonomi umat, seperti yang dilakukan oleh perempuan Muslimah DPRD DKI Jakarta, adalah contoh nyata dari implementasi dakwah dalam konteks modern. Dengan memanfaatkan posisi strategis mereka di legislatif, mereka mampu memperjuangkan kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi umat, khususnya perempuan. Melalui program seperti PPMK, mereka tidak hanya membantu masyarakat dari segi finansial tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya kerja keras, kemandirian, dan solidaritas sosial. Dalam konteks politik, pendekatan ini menunjukkan bahwa dakwah dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan publik yang berbasis nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, integrasi antara dakwah, politik, dan ekonomi membuka peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi tetapi juga kokoh secara spiritual. Pendekatan ini juga menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam membangun umat melalui dakwah berbasis pemberdayaan.

### **3. Dakwah Melalui Advokasi Kebijakan Syariah**

Dalam konteks dakwah modern, advokasi kebijakan berbasis syariah merupakan salah satu strategi yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ranah publik. Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang berjenis kelamin perempuan, seperti Hj. Rany Mauliani, memanfaatkan posisinya di legislatif untuk

---

<sup>12</sup> Kurniasih Mufidayati, An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period, 3 April 2019.

memperjuangkan kebijakan yang berlandaskan syariah, terutama terkait perlindungan perempuan. Hj. Rany Mauliani, misalnya, berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan korban pernikahan sirri. Dalam wawancara, ia menyatakan:

"Yang kita minta hak korban nikah sirri agar diatur dalam Perda, karena korbannya adalah perempuan. Ketika perempuan nikah sirri, dia punya anak dan ditinggal suaminya, dia dapat apa?"<sup>13</sup>

Pernyataan ini menyoroti persoalan serius dalam masyarakat, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari pernikahan sirri. Advokasi terhadap hak-hak ini merupakan bagian dari upaya dakwah melalui kebijakan yang tidak hanya berlandaskan pada nilai syariah tetapi juga mengedepankan keadilan sosial.

Dalam teori dakwah kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, dakwah tidak hanya berupa penyampaian lisan tetapi juga mencakup aksi nyata yang memberikan dampak positif bagi umat.<sup>14</sup> Dalam hal ini, advokasi kebijakan menjadi salah satu medium dakwah yang strategis. Melalui regulasi, nilai-nilai syariah dapat diterjemahkan ke dalam aturan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam kasus perlindungan korban pernikahan sirri, advokasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum dan hak-hak yang selama ini terabaikan. Kebijakan berbasis syariah yang diusulkan oleh Hj. Rany bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah individu, tetapi juga membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Perempuan memiliki peran strategis dalam dakwah, terutama ketika mereka berada di posisi pengambil kebijakan. Dalam penelitian Sarah Joseph tentang politik dan gender di dunia Muslim, perempuan dianggap mampu membawa perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu sosial, seperti perlindungan hak perempuan. Hj. Rany, misalnya, memanfaatkan posisinya di DPRD untuk menyuarakan keprihatinan terhadap perempuan korban pernikahan sirri, sebuah isu yang sering kali diabaikan dalam diskursus publik.

Advokasi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi subjek dalam isu-isu gender, tetapi juga aktor yang aktif dalam memperjuangkan solusi berbasis nilai Islam. Dalam konteks dakwah, peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa Islam

---

<sup>13</sup> Mauliani, An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period.

<sup>14</sup> Fajeri Arkiang dan Rabiatur Adwiah, "Konsep Dakwah Mauidhatul Hasanah dalam Surat An-Nahl Ayat 125," *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 57-68.

dipahami sebagai agama yang melindungi semua pihak, termasuk perempuan yang rentan terhadap ketidakadilan.

Pernikahan sirri adalah salah satu isu kontroversial dalam masyarakat Indonesia. Meskipun secara syariah pernikahan ini sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak sering kali kehilangan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya tidak memiliki akses terhadap tunjangan, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama. Advokasi Hj. Rany untuk mengatur perlindungan perempuan korban pernikahan sirri melalui Peraturan Daerah (Perda) mencerminkan pendekatan dakwah yang solutif dan kontekstual. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan demi melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Dalam Islam, keadilan adalah nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk kebijakan publik. Menurut Ibn Khaldun, keadilan adalah prinsip utama dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks advokasi kebijakan berbasis syariah, nilai keadilan ini diterjemahkan ke dalam perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Pernikahan sirri, meskipun dianggap sah dalam pandangan syariah, sering kali menyebabkan ketidakadilan sosial karena tidak adanya jaminan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, advokasi yang dilakukan oleh Hj. Rany menjadi upaya untuk mengintegrasikan prinsip keadilan Islam dalam sistem hukum modern.

Upaya memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan publik bukanlah hal yang baru. Dalam teori *Islamic Public Policy*, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi, kebijakan publik yang berbasis syariah harus dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang melindungi korban pernikahan sirri adalah bentuk nyata dari implementasi syariah dalam konteks modern. Kebijakan semacam ini tidak hanya relevan dari perspektif Islam tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, dakwah melalui kebijakan publik menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> YULI UTAMI, "AN ISLAMIC JURISPRUDENCE APPROACH TO THE CONTEMPORARY ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCIAL ISSUES: Introduce Al-Qaradawi Approaches," *and Financial Inclusion (ICIEFI)* 23 (2015): 100.

Meskipun penting, advokasi kebijakan berbasis syariah sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi politik maupun sosial. Resistensi terhadap regulasi semacam ini dapat muncul dari kelompok yang menganggapnya terlalu eksklusif atau bertentangan dengan prinsip pluralisme. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk mendialogkan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan masyarakat modern.

Sebagai contoh, advokasi Hj. Rany tentang perlindungan perempuan korban pernikahan sirri dapat menjadi titik awal untuk diskusi yang lebih luas tentang reformasi hukum keluarga di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa dakwah melalui kebijakan membutuhkan kesabaran, keteguhan, dan pendekatan yang inklusif.

Dakwah melalui advokasi kebijakan syariah, seperti yang dilakukan oleh Hj. Rany Mauliani, merupakan bentuk dakwah yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan memperjuangkan perlindungan perempuan korban pernikahan sirri, ia menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berupa ajakan moral tetapi juga tindakan nyata untuk menciptakan keadilan sosial. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan publik adalah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang tidak hanya berlandaskan nilai-nilai Islam tetapi juga adil dan sejahtera. Upaya ini menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam memperjuangkan dakwah melalui jalur politik, khususnya dalam isu-isu yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok rentan.

#### **4. Dakwah Melalui Pendekatan Keluarga**

Dakwah dengan pendekatan keluarga merupakan salah satu strategi penting dalam membangun masyarakat Islami yang kokoh. Para anggota DPRD DKI Jakarta perempuan periode 2009-2014 dan 2014-2019 memahami bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang berperan sebagai basis pembentukan karakter individu. Hal ini terlihat dari pandangan Dra. Hj. Kurniasih Mufidayati yang menyatakan pentingnya optimalisasi pengembangan kualitas keluarga:

"Saya pribadi sebagai anggota DPRD pada saat itu, saran saya lebih cenderung untuk bisa mengangkat isu tentang optimalisasi pengembangan kualitas keluarga di Jakarta karena perempuan dan anak bagian dari keluarga, perempuan tidak bisa sendirian harus bermitra dengan laki-laki."<sup>16</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa perempuan, sebagai pilar utama keluarga, membutuhkan dukungan dari laki-laki sebagai pasangan untuk menciptakan harmoni

---

<sup>16</sup> Mufidayati, An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period.

dalam rumah tangga. Pandangan ini mencerminkan pentingnya pendekatan dakwah yang menyentuh seluruh elemen dalam keluarga, bukan hanya individu tertentu. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi penting untuk menanamkan nilai-nilai agama. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga keluarga dari penyimpangan, sebagaimana dalam Surah At-Tahrim ayat 6: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Ayat ini menegaskan tanggung jawab kolektif dalam keluarga untuk memastikan nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota dewan, seperti Dra. Hj. Kurniasih, melihat keluarga sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Pendekatan keluarga yang diusulkan oleh Dra. Hj. Kurniasih menitikberatkan pada kerja sama antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Dalam kajian dakwah, kerja sama ini dikenal sebagai pendekatan berbasis kemitraan, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran yang saling melengkapi. Menurut perspektif gender dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi saling terkait. Dalam keluarga, laki-laki bertanggung jawab sebagai pemimpin, sementara perempuan menjadi pendidik utama anak-anak. Namun, keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.<sup>17</sup> Optimalisasi peran ini dapat diwujudkan melalui:

1. Peningkatan Pendidikan Keluarga: Program-program edukasi keluarga yang fokus pada pembentukan karakter Islami.
2. Dukungan Kebijakan untuk Keluarga Sejahtera: Kebijakan yang mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan untuk seluruh anggota keluarga.
3. Penguatan Nilai Religius dalam Rumah Tangga: Melibatkan seluruh keluarga dalam aktivitas keagamaan seperti salat berjamaah dan pengajian.

Pendekatan yang diusulkan oleh para Wanita anggota DPRD juga berhubungan erat dengan isu gender dalam Islam. Dalam kerangka dakwah, perempuan sering kali dilihat sebagai agen perubahan di dalam keluarga. Sebagai ibu, perempuan memiliki peran sentral dalam mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang taat agama dan bertanggung jawab. Namun, peran ini tidak dapat dijalankan sendirian.

---

<sup>17</sup> Danik Fujiati, "Relasi gender dalam institusi keluarga dalam pandangan teori sosial dan feminis," *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153130.

Dalam perspektif feminisme Islam, seperti yang dijelaskan oleh Fatima Mernissi, perempuan tidak boleh hanya dibebani tanggung jawab domestik. Sebaliknya, keluarga harus menjadi ruang kolaboratif di mana laki-laki dan perempuan saling mendukung untuk menciptakan rumah tangga yang Islami. Hal ini sesuai dengan pandangan Dra. Hj. Kurniasih, yang menekankan bahwa perempuan membutuhkan dukungan dari laki-laki untuk menjalankan perannya secara optimal.

Meskipun penting, dakwah melalui pendekatan keluarga menghadapi berbagai tantangan, terutama di lingkungan perkotaan seperti Jakarta. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Tingginya Tingkat Perceraian: Perceraian sering kali menyebabkan disfungsi dalam keluarga dan memengaruhi pendidikan anak.
2. Krisis Peran Gender: Perubahan sosial dan ekonomi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.
3. Pengaruh Globalisasi: Media dan budaya global sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Untuk mengatasi tantangan ini, anggota dewan seperti Dra. Hj. Kurniasih memandang perlunya kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga. Hal ini melibatkan program-program yang tidak hanya memberikan edukasi kepada orang tua tetapi juga mengatasi masalah-masalah sosial yang memengaruhi keluarga. Upaya dakwah berbasis keluarga dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik melalui berbagai cara. Dalam konteks DPRD DKI Jakarta, anggota dewan perempuan berperan penting dalam merancang program-program yang mendukung penguatan keluarga, seperti:

1. Layanan Konseling Keluarga: Penyediaan konseling untuk pasangan suami-istri yang menghadapi masalah rumah tangga.
2. Program Pendidikan Orang Tua: Kursus dan pelatihan untuk orang tua dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam.
3. Fasilitas Pendukung Keluarga: Penyediaan ruang terbuka hijau dan tempat ibadah yang dapat digunakan untuk aktivitas keluarga.

Dakwah melalui pendekatan keluarga, sebagaimana diusulkan oleh Dra. Hj. Kurniasih, adalah salah satu strategi penting dalam menciptakan masyarakat yang Islami. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai-nilai agama dan sosial, dengan menekankan pentingnya kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah institusi yang harus dijaga dan

diberdayakan.<sup>18</sup> Melalui kebijakan publik yang mendukung ketahanan keluarga, anggota dewan perempuan di DPRD DKI Jakarta telah menunjukkan bahwa dakwah dapat dilakukan tidak hanya melalui ceramah atau pengajian tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks Jakarta tetapi juga dapat menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Peran dakwah anggota perempuan Muslimah DPRD DKI Jakarta tidak terbatas pada dakwah konvensional seperti ceramah atau pengajian, tetapi terwujud melalui pendekatan struktural yang lebih strategis. Pendekatan ini mencakup penguatan institusi keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, advokasi kebijakan berbasis syariah, dan optimalisasi pengembangan kualitas keluarga. Melalui peran mereka, nilai-nilai Islam diupayakan untuk menjadi bagian integral dalam kebijakan publik dan program pembangunan di DKI Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dakwah berbasis kebijakan dapat menjadi alternatif strategis dalam memperluas cakupan dan efektivitas dakwah Islam di wilayah perkotaan. Peran perempuan dalam politik, khususnya sebagai anggota legislatif, memiliki potensi besar untuk mendobrak stigma bahwa dakwah hanya berbasis masjid atau komunitas kecil. Perempuan Muslimah dalam ranah politik memiliki kemampuan untuk mengarahkan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai agama.

#### E. Daftar Pustaka

- Ardiansya, Ariyanto, Sunarwan Sulaiman, Nasrullah Nasrullah, dan Maskawati Maskawati. "Gender Equality in Political Life in Indonesia." *International Journal of Health Sciences*, 2 Juli 2022, 678–91. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS6.10182>.
- Arkiang, Fajeri, dan Rabiatus Adwiah. "Konsep Dakwah Maudhatul Hasanah dalam Surat An-Nahl Ayat 125." *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 57–68.
- Asad, Muhammad. *The principles of state and government in Islam*. Univ of California Press, 2023.  
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=asPLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+Principles+of+State+and+Government+in+Islam&ots=PyY-879J3f&sig=7ntkVgheCi1EDc-YHMNHTUFICxY>.
- Fujiati, Danik. "Relasi gender dalam institusi keluarga dalam pandangan teori sosial dan feminis." *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153130.
- Hulwani, Nurjanah. An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period, 3 April 2019.

---

<sup>18</sup> Muhammad Nur Kholis, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 274–90.

- Kholis, Muhammad Nur. "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 274-90.
- Mauliani, Rany. An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period, 3 April 2019.
- Mufidayati, Kurniasih. An interview with a member of the DPRD DKI Jakarta for the 2004-2019 period, 3 April 2019.
- Muhamad. "Refleksi Penafsiran Ayat-ayat Dakwah Thomas McElwain." *Ad-DA'WAH* 21, no. 1 (20 Februari 2023): 12-25. <https://doi.org/10.59109/addawah.v21i1.37>.
- Mulyawan, Muhammad Andhika Febri. "Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46581>.
- Nurchahyo, Abraham. "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 01 (2016): 25-34.
- Paramesti, Artanti, dan Revo Linggar Vandito. "IMPLEMENTASI KUOTA GENDER DALAM MEMPENGARUHI EKSISTENSI PEREMPUAN: STUDI KASUS REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPRD DKI JAKARTA PERIODE 2019-2024." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 02 (2024): 17-33.
- Syafrudin, Iqbal. "Peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender (study perilaku politik 2 anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia)." *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 176-81.
- UTAMI, YULI. "AN ISLAMIC JURISPRUDENCE APPROACH TO THE CONTEMPORARY ISLAMIC ECONOMICS, BANKING AND FINANCIAL ISSUES: Introduce Al-Qaradawi Approaches." *and Financial Inclusion (ICIEFI)* 23 (2015): 100.